





 <p>SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE</p>	Nomor SOP	:	1082/ORT.06-SD/2/1107/2024
	Tanggal Pengesahan	:	17 Desember 2024
	Disahkan Oleh	:	 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE SEKRETARIAT NETI SAPARITA
	Nama SOP	:	SOP PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KIP KABUPATEN PIDIE

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1.	Memahami Proses Penggugahan Produk Hukum;
		2.	Mengetahui dan Memahami Informasi Kepemiluan;
		3.	Kepemiluan; Mampu Mengoperasikan Komputer dan Sosial Media
2	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)		
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh		

7	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	
8	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. 2. 3.	Ketua KIP Sekretaris KIP Kasubbag Tekmis Penyelenggaraan, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	1. PC/ Laptop 2. Internet 3. Printer 4. Scanner
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi secara Elektronik tidak tersampaikan kepada pihak yang membutuhkan Jaringan Informasi	Update Informasi Produk Hukum Peraturan, PKPU, UUD dan Keputusan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KIP KABUPATEN PIDIE**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU
		BAGIAN/SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KIP				1 nota dinas; 2 Flashdisk/Media penyampain softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KIP ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				Buku agenda	
3	a. Ototentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KIP Kabupaten Pidie b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KIP				Lembar disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				Buku agenda	Scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tandatangani oleh Ketua KIP atau Sekretaris KIP dan Naskah Salinan Keputusan KIP yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap Dinas b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH KIP Kabupaten Pidie					Naskah salinan produk hukum

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 17 Desember 2024

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Pidie

